

Judul : Perjalanan Inosentius hingga Tergeser Adies
Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Perjalanan Inosentius hingga Tergeser Adies

Posisi Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi pengganti Arief Hidayat akhirnya digantikan oleh Adies Kadir. Proses pergantian itu berlangsung secara kilat.

Nikolaus Harbowo dan Susana Rita Kumalasanti

Inosentius Samsul, mantan Kepala Badan Keahlian DPR, gagal menjadi hakim konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang memasuki usia pensiun pada 3 Februari 2026. Posisinya digantikan oleh Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, yang oleh DPR ditetapkan sebagai calon hakim konstitusi dalam rapat paripurna, Senin (26/1/2026).

Fudahal, Inosentius pernah hadir dalam rapat paripurna serupa pada 21 Agustus 2025, ketika dirinya ditetapkan sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR, menggantikan Arief. Nama Inosentius tergeser begitu saja. Hanya sembilan hari sebelum Arief mengakhiri tugasnya, sembilan hari sebelum dirinya mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi.

Persiapan menuju plectantik sebenarnya sudah dimulai. Tim humas Mahkamah Konstitusi (MK) sudah beberapa kali ke Gedung DPR untuk membuat video profil Inosentius. Sudah menjadi kebiasaan di MK, acara pisa sambut hakim konstitusi selalu diramalkan dengan pemutaran video profil hakim konstitusi yang lama dan yang baru. Bahkan, Sabtu (24/1), bersama sejumlah kru tim media MK, Inosentius masih *shootng* di rumah. Berdasarkan informasi yang diungkap, Inosentius bersama istri, anak, cucu, beserta ibunya menjalani beberapa adegan. Dengan seragam keluarga warna putih bewahun jins biru atau celana hitam. Keluarga Inosentius tampak diambil gambarnya di depan gambar "The Last Supper" (Perjamuan Terakhir) yang terpampang di dinding rumah. Ada adegan Inosentius bekerja di depan laptop dengan buku-buku. Ada saat Inosentius diambil gambarnya sewaktu momong anak kecil bersama istrinya di depan sebuah kolam dengan sebuah patung di rumahnya.

Tak hanya itu, Inosentius beberapa kali hadir di acara-acara MK. Misalnya, pada 7 Januari 2026, ia datang mengikuti agenda Laporan Tahunan MK 2025 yang digelar di gedung utama MK. Ia bergabung dengan para hakim konstitusi, makan bersama, sesudah kegiatan di aula Gedung MK.

Pada awal Desember 2025, ia menghadiri Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini kehadiran Inosentius pertama dalam acara serupa. Di Labuan Bajo, Inosentius duduk di kursi depan bersama para tamu undangan, seperti Ketua MK Suhartono, Ketua Mahkamah Agung Simarto, dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Biasanya beberapa hakim



Adies Kadir memberi salam kepada anggota DPR setelah ditetapkan sebagai calon hakim konstitusi saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara-II, Jakarta, Selasa (27/1/2026). DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan calon hakim konstitusi, anggota Ombudsman RI, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta melantik Wakil Ketua DPR.

mendapatkan pengisian lain. Ya, jadi tugas pengisian lain, dan ini juga sedang dalam proses," ucap Wakil Ketua DPR Saam Mustopa saat ditemui sesudah rapat paripurna. Namun, Saam enggan mengungkapkan pengisian lain dimaksud.

Ketua Komisi III DPR itu hiburkannya juga memperoleh informasi bahwa Inosentius akan mendapatkan pengisian lain. "Sehingga Komisi III DPR perlu melakukan *fit and proper test* lagi untuk mencari calon pengganti Pak Arief Hidayat yang akan pensiun pada 3 Februari yang akan datang," ucapnya.

Habiburokmon enggan mengungkapkan pengisian lain bagi Inosentius tersebut. Ia hanya menyebut pengisian baru untuk Inosentius sudah ada sejak pekan lalu. "Minggu lalu, Minggu lalu," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Kompas*, yang dimaksud pengisian lain terhadap Inosentius bukanlah menjadi hakim MK unsur DPR, melainkan hakim MK dari unsur pemerintahan. Habiburokmon tidak menjawab saat ditanya soal itu. Ia hanya kembali menegaskan ada pengisian lain untuk Inosentius.

Inosentius pun tidak bersedia mengungkap pengisian yang diterimanya setelah namanya tiba-tiba dicoret sebagai calon hakim konstitusi. "Saya mohon maaf tidak bisa merespons poin-poin di atas," ujarnya singkat kepada *Kompas* saat dimintai keterangan mengenai pengisian lain tersebut ialah menjadi hakim konstitusi usulan Presiden.

Dugaan "tukar guling"
Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia Arifri Cha-

niago menilai, peristiwa tersebut mengindikasikan kuat adanya praktik "tukar guling politik" dalam penunjukan hakim MK. Ia bahkan menduga terdapat agenda strategis ke depan yang membuat Partai Golkar dan Adies bersedia melepas posisi Wakil Ketua DPR untuk beralih ke jabatan hakim konstitusi.

"Kalau saya membacanya bukan hanya tukar guling, seperti soal MPR yang sebelumnya dimiliki Golkar, tetapi diambil oleh Gerindra. Tentu juga ada apakah ini agenda Golkar atau mungkin agenda lain," katanya.

Kisah "tukar guling politik" ini bukanlah preseden pertama. Ketika awal pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Bahliil Lahadalia juga pernah secara terbuka mengungkapkan cerita di balik penambahan jatah kursi menteri dari Golkar yang semula lima menjadi delapan. Disebutkan oleh Bahliil, penambahan kursi menteri itu tidak terlepas dari upaya "tukar guling" kursi Ketua MPR yang sebelumnya merupakan jatah Golkar akhirnya diserahkan kepada Partai Gerindra sebagai partai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Arifri mengungkapkan bahwa berbagai asumsi bermunculan dengan adanya "tukar guling" hakim konstitusi ini, terlebih di tengah penundaan pembahasan isu pemilihan kepala daerah melalui DPR. Menurut dia, hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah putusan MK dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai merugikan partai-partai besar.

"Misalnya soal ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Putusan itu mengunci posisi sejumlah partai besar karena justru membuka ruang bagi partai-partai kecil untuk ikut berkontestasi dalam pilpres setelah lolos verifikasi," ujarnya.

Arifri menilai, penunjukan tersebut sulit dilepaskan dari adanya kepentingan tertentu. "Saya kira tidak ada makna siang yang gratis. Pasti ada agenda yang tersirat," ujarnya. Ia menyoreti latar belakang Adies yang lebih kuat sebagai politisi ketimbang profesional independen. Menurut Arifri, meskipun Adies memiliki basis pendidikan hukum, secara posisi politik ia tetap merepresentasikan Partai Golkar dan koalitannya di DPR.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menilai, dugaan praktik tukar guling, jika benar terjadi, berpotensi mengesewakan publik. Menurut dia, tukar guling merupakan kesepakatan pertukaran jabatan di luar mekanisme yang semestinya sehingga besar kemungkinan surat dengan *deal-and* politik. "Dalam politik ada adagium klasik *there is no free lunch*. 'Tidak ada makan siang gratis'. Bisa jadi tukar guling itu merupakan bagian dari logika tersebut, selalu ada 'harga' atau imbal balik, baik dalam bentuk kompensasi kekuasaan, jabatan, maupun posisi strategis," ungkap Lili.

Ia mengingatkan, jika pola semacam itu terjadi dalam konteks pemilihan dan pengangkatan hakim MK, hal tersebut dapat mengganggu independensi MK. Padahal, ujarnya, MK merupakan lembaga yang harus independen. "Kalau tidak, pupus sudah harapan publik terhadap MK," katanya.